

SIARAN PERS

MASYARAKAT SIPIL INDONESIA DESAK PEMERINTAH DUKUNG AGENDA MASYARAKAT ADAT DI COP 16 CBD

Cali, Kolombia – 24 October 2024 – Hampir 200 negara berkumpul di Cali, Kolombia, untuk merundingkan upaya menghentikan dan membalikkan kerusakan alam dan punahnya keanekaragaman hayati. Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia yang hadir di Cali menyerukan kepada delegasi Pemerintah Indonesia yang sedang berunding serta komunitas global untuk mendukung agenda terkait hak-hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (IP&LC).

Urgensi Mendukung Agenda Masyarakat Adat di COP16

Penghormatan terhadap hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal menempati peran penting dalam Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global atau *Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework* (KM-GBF) yang disepakati dua tahun lalu. Pada COP 16 CBD, Masyarakat Adat mendorong negara-negara yang hadir untuk memastikan pengakuan penuh atas kontribusi Masyarakat Adat dalam perlindungan keanekaragaman hayati di dunia, serta mendorong ditetapkannya pembentukan badan permanen (*Subsidiary Body*) yang mengikat khusus *Article 8j* terkait pengetahuan lokal, inovasi, dan praktik-praktik tradisional dalam perlindungan keanekaragaman hayati.

Sayangnya, perwakilan delegasi Indonesia justru menolak pendirian *Subsidiary Body* tersebut. Padahal, kontribusi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal untuk mencapai target KM-GBF sangat besar.

“Penolakan delegasi Indonesia terhadap pembentukan *Subsidiary Body* pada *Article 8j* tentang Pengetahuan, Inovasi, dan Praktik-Praktik Tradisional adalah sebuah kemunduran. Pembicaraan terkait upaya mempermanenkan *Working Group on Article 8j* sudah dilakukan sejak 20 tahun lalu untuk memastikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional. Juga, inovasi dan praktik yang dilakukan oleh Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya genetik. Pasca komitmen KM-GBF, adanya kerangka kerja dan pembentukan *Subsidiary Body* dapat memastikan terukur dan terjaminnya dimensi keadilan dan sosial dari implementasi KM-GBF,” ungkap **Cindy Julianty dari WGII** (*Working Group on Indigenous and Local Communities-Conserved Areas and Territories Indonesia*).

Saat ini wilayah adat di Indonesia yang telah terpetakan sudah mencapai 30,1 juta hektar. Namun, baru 16% dari wilayah tersebut yang telah diakui secara hukum. “Menjamin hak penguasaan tanah masyarakat adat adalah hal yang terpenting jika kita ingin melindungi

keanekaragaman hayati yang masih tersisa,” kata **Kasmita Widodo, Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA)**.

Menjamin dan melindungi wilayah masyarakat adat dan kawasan konservasi akan membantu Indonesia mencapai target 30x30 (perlindungan 30% area keanekaragaman hayati di daratan dan lautan pada tahun 2030). Menurut data terbaru dari WGII, terdapat lebih dari 22 juta hektare lahan yang masyarakat Indonesia kelola dan lindungi dengan pengetahuan tradisional, yang dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan konservasi Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global atau *Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework* (KM GBF).

Butuh Aksi Segera untuk Hentikan Penyebab Hilangnya Keanekaragaman Hayati

Saat ini, keanekaragaman hayati Indonesia terancam oleh aktivitas industri-industri ekstraktif seperti pertambangan, eksploitasi dan penebangan hutan, pertanian skala besar, dan berbagai proyek strategis nasional. Izin-izin ekstraktif di Indonesia telah menguasai lebih dari 100 juta hektare daratan dan lautan di Indonesia (55,5 juta hektare di daratan dan 45,4 juta hektare di lautan). Hadirnya industri-industri, yang juga didorong permintaan dan kebutuhan global seperti batu bara, minyak sawit, kayu, dan nikel, telah menyebabkan deforestasi besar-besaran dan kerusakan habitat.

Pidato Presiden Prabowo dalam pelantikannya pada 20 Oktober lalu telah menargetkan swasembada pangan dalam 4-5 tahun dengan mengandalkan *food estate*. Saat ini sedang berlangsung pengembangan program *food estate* di beberapa provinsi, di antaranya di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara dan Papua Selatan dengan target luas lebih dari 2 juta hektare. Program *food estate* tersebut telah mengakibatkan kehancuran ekosistem keanekaragaman hayati dan wilayah adat, budaya serta kearifan lokal masyarakat adat.

Ogy Dwi Aulia dari Forest Watch Indonesia menyatakan bahwa komitmen terhadap perlindungan keanekaragaman hayati harus ditunjukkan dengan aksi nyata mengurangi secara signifikan aktivitas-aktivitas industri ekstraktif yang membahayakan keanekaragaman hayati di Indonesia seperti nikel, sawit, food estate, HPH, HTI, Pertambangan, dan lain sebagainya. “Saat ini, ada lebih dari 1 juta hektare industri ekstraktif di kawasan konservasi. Selain itu, ada juga 20,5 juta hektar industri ekstraktif berada dalam area ekosistem penting seperti koridor satwa, taman kehati, dan area biodiversitas penting,” tambah Ogy.

Keanekaragaman hayati laut Indonesia juga perlu segera dilindungi. Saat ini, jutaan hektare wilayah laut Indonesia dikelola secara berkelanjutan oleh masyarakat pesisir. Hal ini berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan pencapaian (Indonesia Biodiversity Strategic Action Plan (IBSAP), khususnya dalam upaya melindungi 30% area laut Indonesia.

“Dalam agenda Keanekaragaman Hayati Laut dan Pesisir serta Pulau-Pulau, Indonesia perlu mendukung teks yang memastikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, akses terhadap keadilan dan informasi, serta perlindungan bagi pembela hak asasi manusia

dan lingkungan, masyarakat adat, dan komunitas lokal, dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia,” jelas **Rayhan Dudayev dari Greenpeace**.

“Selain itu, akan sangat strategis jika Indonesia mendukung Annex 2(g) untuk meningkatkan pemahaman tentang dampak pengasaman laut dan tekanan lainnya terhadap ekosistem pulau, yang sangat relevan bagi negara kita sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia,” tambahnya.

Dukung Pendanaan Langsung bagi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal

Masyarakat Adat dipercaya sebagai salah satu kekuatan dunia yang berperan penting menahan perubahan iklim dan punahnya keanekaragaman hayati. Namun, mekanisme keuangan yang ada saat ini belum memadai sehingga Masyarakat Adat yang melindungi keanekaragaman hayati tidak memiliki sumber daya yang memadai.

Oleh karenanya, Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia menyerukan dibentuknya mekanisme pendanaan langsung untuk menyalurkan dukungan kepada Masyarakat Adat, nelayan skala kecil, petani, dan masyarakat lokal, tanpa bergantung pada solusi berbasis pasar yang berisiko seperti kredit dan offset keanekaragaman hayati.

“Kita memerlukan sistem pendanaan yang transparan dan akuntabel, yang dapat diakses langsung oleh Masyarakat Adat untuk melanjutkan pekerjaan konservasi penting kami,” kata **Eustobio Rero Renggi, juru bicara dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara** yang juga hadir pada COP 16 CBD tersebut.

Sayangnya, delegasi pemerintah Indonesia dalam COP 16 CBD tidak menghendaki adanya pendanaan langsung yang dapat diakses oleh Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal. Pada COP 16 CBD waktu setempat, delegasi pemerintah Indonesia menyampaikan pernyataan yang mendukung pemerintah India terkait tidak diperlukannya “pendanaan langsung” bagi Masyarakat Adat.

Selain itu, delegasi pemerintah Indonesia juga bersepakat dengan pernyataan pemerintah Brazil, bahwa dukungan pendanaan langsung tersebut harus bisa masuk melalui otoritas nasional (pemerintah), sehingga perlu disesuaikan dengan kebutuhan (kepentingan) nasional.

Eustobio menyesalkan sikap delegasi pemerintah Indonesia dan mendesak pemerintah Indonesia untuk menarik pernyataan tersebut. “Kami atas nama Masyarakat Adat menyesalkan sikap dan pernyataan delegasi pemerintah Indonesia yang telah mengabaikan hak-hak konstitusional kami sebagai penyandang hak utama yang telah menjaga ekosistem dan keanekaragaman hayati secara turun temurun, jauh sebelum adanya negara,” kata Eustobio.

Lebih lanjut, Eustobio menyarankan kepada delegasi pemerintah Indonesia untuk menyepakati usulan dari mayoritas negara-negara yang menghendaki adanya pendanaan langsung tersebut.

“Mayoritas negara-negara seperti Meksiko, Namibia, Swiss, bahkan Uni Eropa, dan yang lain telah berkomitmen untuk mendukung adanya pendanaan langsung. Seharusnya, pemerintah Indonesia bisa mengambil contoh yang baik untuk mendukung komitmen kepada Masyarakat Adat seperti yang terjadi di negara-negara lain, apalagi 60% populasi Masyarakat Adat terbesar ada di Asia, dan salah satunya Indonesia,” Eustobio menegaskan.

Narahubung:

Ogy Dwi Aulia, Forest Watch Indonesia (FWI)

Email: ogy@fwi.or.id

Phone: +62 813-1498-9276

Cindy Julianty, WGII (*Working Group on Indigenous and Local Communities-Conserved Areas and Territories Indonesia*).

Email: cindy.julianty@gmail.com

Phone: +62 851-2110-7321

Eustobio, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

Email: eustobio@aman.or.id

Phone: +62 823-4229-5139

Lampiran Press Release (Infografis):

<https://drive.google.com/drive/folders/1JqDXkhp96RmiJMdlmQiWUF8KgQzexRUS?usp=sharing>

Referensi:

- COP-16 adalah momentum yang sangat penting yang perlu dikawal oleh para pihak untuk memastikan negara-negara anggota dapat menyelesaikan Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati atau *National Biodiversity Strategy and Action Plan* (NBSAP) sebagai panduan dalam implementasi Kerangka Kerja Global Keanekaragaman Hayati Kunming-Montreal atau KM-GBF. COP-16 CBD juga akan menetapkan berbagai dokumen pendukung untuk melengkapi dan memantau implementasi komitmen KM-GBF di level nasional yang dituangkan dalam berbagai item negosiasi seperti *monitoring framework, article 8j, resource mobilization, capacity building mechanism, dan lain sebagainya*.
- Article 8(j) menyatakan bahwa Setiap Pihak yang mengikat perjanjian, sejauh mungkin dan sesuai dengan kondisi yang tepat, harus: Berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional, menghormati, melestarikan, dan mempertahankan pengetahuan, inovasi, dan praktik-praktik masyarakat adat dan komunitas lokal yang mengadopsi gaya hidup tradisional yang relevan untuk konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati. Selain itu, Pihak harus mendorong penerapan yang lebih luas dari pengetahuan, inovasi, dan praktik tersebut dengan persetujuan dan keterlibatan dari pemilik pengetahuan, inovasi, dan praktik tersebut, serta mendorong pembagian manfaat yang adil dari pemanfaatannya.
- Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tak tertandingi dengan total 190 juta hektar luas daratan dan 327 juta hektar luas lautan. Keanekaragaman hayati tersebut tersebar di lebih dari 17 ribu pulau yang dikelilingi oleh lautan. CSO Indonesia mendesak para negosiator untuk mengatasi tiga masalah utama yang sangat penting untuk mengamankan masa depan keanekaragaman hayati dan masyarakat ada dan lokal yang menjadi bagian didalamnya.
- Sebagai bentuk kepedulian organisasi-organisasi masyarakat sipil di Indonesia terhadap biodiversity dan hak-hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal, Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia telah mengeluarkan statement bersama untuk merespon proses-proses negosiasi yang sedang berlangsung di COP 16 CBD di Cali, Colombia pada tanggal 21 Oktober - 1 November 2023. Berikut link statement bersama CSO Indonesia: [Joint Statement Indonesia Civil Society Organization to COP 16 CBD](#)

English version

Press Release: Indonesian Civil Society Urges Government to Support Indigenous Peoples' Agenda at COP 16 CBD

Cali, Colombia – October 24, 2024 – Nearly 200 countries are gathering in Cali, Colombia, to negotiate efforts to halt and reverse environmental damage and biodiversity loss. Indonesian civil society organizations present in Cali are calling on the negotiating governments and the global community to support the agenda concerning the rights of Indigenous Peoples and Local Communities (IP&LC).

The Urgency of Supporting the Indigenous Peoples' Agenda at COP 16

The recognition of the rights of Indigenous Peoples and Local Communities plays a crucial role in the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KM-GBF), agreed upon two years ago. At COP 16 CBD, Indigenous Peoples are urging attending countries to ensure full acknowledgment of their contributions to global biodiversity protection. They also advocate for the establishment of a permanent Subsidiary Body, binding under Article 8j, focused on local knowledge, innovations, and traditional practices in biodiversity conservation.

Unfortunately, Indonesia's delegation has opposed the establishment of this Subsidiary Body, despite the significant contribution Indigenous Peoples and Local Communities make toward achieving KM-GBF targets.

"The rejection of the Subsidiary Body under Article 8j on Knowledge, Innovation, and Traditional Practices by Indonesia is a step backward. Discussions to formalize the Working Group on Article 8j have been ongoing for 20 years to ensure the protection of traditional knowledge, as well as innovations and practices of Indigenous Peoples and Local Communities in utilizing and protecting genetic resources. After the KM-GBF commitment, a framework and the creation of the Subsidiary Body would ensure that justice and social dimensions of the KM-GBF's implementation are measured and guaranteed," said Cindy Julianty from WGII (Working Group on Indigenous and Local Communities-Conserved Areas and Territories Indonesia).

Currently, 30.1 million hectares of Indigenous territories in Indonesia have been mapped, but only 16% of these areas have been legally recognized. "Securing land rights for Indigenous Peoples is essential if we are to protect the remaining biodiversity," said Kasmita Widodo, Head of the Indigenous Territory Registration Agency (BRWA).

Safeguarding Indigenous lands and conservation areas will help Indonesia achieve the 30x30 target (protecting 30% of biodiversity areas on land and sea by 2030). According to the latest WGII data, more than 22 million hectares are managed and protected using traditional knowledge, contributing to the conservation goals of the Global Biodiversity Framework.

Immediate Action Needed to Stop Biodiversity Loss

Indonesia's biodiversity is currently threatened by extractive industries such as mining, large-scale agriculture, and various national strategic projects. Extractive permits cover over 100 million hectares of land and sea in Indonesia (55.5 million hectares on land and 45.4 million hectares at sea). These industries, driven by global demand for coal, palm oil, timber, and nickel, have led to massive deforestation and habitat destruction.

In his October 20 inauguration speech, President Prabowo set a goal of food self-sufficiency within 4-5 years, relying on food estates. Food estate programs are currently being developed in several provinces, including Central Kalimantan, North Sumatra, and South Papua, targeting over 2 million hectares. These programs have devastated biodiversity ecosystems, Indigenous lands, and traditional cultures.

Ogy Dwi Aulia from Forest Watch Indonesia emphasized that commitments to biodiversity protection must be shown through concrete actions, significantly reducing extractive activities that endanger biodiversity in Indonesia, such as nickel, palm oil, food estates, logging, and mining. "Currently, over 1 million hectares of extractive industries are operating within conservation areas. Additionally, 20.5 million hectares of extractive industries are located within key ecosystems such as wildlife corridors, biodiversity parks, and critical biodiversity areas," added Ogy.

Indonesia's marine biodiversity also requires immediate protection. Millions of hectares of Indonesia's marine areas are managed sustainably by coastal communities, contributing to food security and achieving the Indonesia Biodiversity Strategic Action Plan (IBSAP), particularly the effort to protect 30% of Indonesia's marine areas.

"In the Marine and Coastal Biodiversity agenda, as well as for small islands, Indonesia must support texts that ensure community participation in decision-making, access to justice and information, and protection for human rights and environmental defenders, Indigenous Peoples, and local communities, using a human rights-based approach," explained Rayhan Dudayev from Greenpeace.

"Moreover, it would be strategic for Indonesia to support Annex 2(g) to enhance understanding of ocean acidification impacts and other pressures on island ecosystems, which is highly relevant for our country as one of the largest maritime nations in the world," he added.

Support Direct Funding for Indigenous Peoples and Local Communities

Indigenous Peoples are recognized as a global force in curbing climate change and preventing biodiversity loss. However, the current financial mechanisms are inadequate, leaving Indigenous Peoples without sufficient resources to protect biodiversity. Indonesian civil society organizations are calling for the establishment of direct funding mechanisms to support Indigenous Peoples, small-scale fishers, farmers, and local communities without relying on market-based solutions such as biodiversity credits and offsets.

"We need a transparent and accountable funding system, accessible directly to Indigenous Peoples, to continue our critical conservation work," said Eustobio Rero Renggi, spokesperson for the Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago (AMAN), who also attended COP 16 CBD.

Unfortunately, the Indonesian government delegation at COP 16 CBD opposed the idea of direct funding for Indigenous Peoples and Local Communities. During the event, the Indonesian delegation voiced support for India's stance, which stated that "direct funding" for Indigenous Peoples was unnecessary. Additionally, the Indonesian delegation aligned with Brazil's position that such funding should be channeled through national authorities, thus aligning with national interests.

Eustobio expressed regret over the stance of the Indonesian government delegation and urged them to retract their statement. "On behalf of Indigenous Peoples, we regret the Indonesian government's delegation's position, which disregards our constitutional rights as the primary custodians of ecosystems and biodiversity, preserved for generations before the state's existence," said Eustobio. He further urged the Indonesian government to agree with the proposals from the majority of countries supporting direct funding.

"Countries like Mexico, Namibia, Switzerland, and even the European Union have committed to supporting direct funding. Indonesia should follow the positive example of these countries, especially since 60% of the world's Indigenous population resides in Asia, with Indonesia being a key player," Eustobio concluded.

Contacts:

Ogy Dwi Aulia, Forest Watch Indonesia (FWI)

Email: ogy@fwi.or.id

Phone: +62 813-1498-9276

Cindy Julianty, WGII (Working Group on Indigenous and Local Communities-Conserved Areas and Territories Indonesia)

Email: cindy.julianty@gmail.com

Phone: +62 851-2110-

Eustobio Rero Renggi, Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago (AMAN)

Email: eustobio@aman.or.id, Phone: +62 823-4229-5139

Attachments:

<https://drive.google.com/drive/folders/1JgDXkhp96RmiJMdlmQiWUF8KgQzexRUS?usp=sharing>

References:

- COP-16 is a critical moment that requires all parties to ensure that member states finalize their National Biodiversity Strategy and Action Plan (NBSAP), guiding the implementation of the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. COP-16 CBD will also establish supporting documents to monitor KM-GBF commitments nationally, including negotiation items such as monitoring frameworks, Article 8j, resource mobilization, and capacity-building mechanisms.
- Article 8(j) states that each Party to the agreement, as far as possible and as appropriate, shall: In accordance with national legislation, respect, preserve, and maintain the knowledge, innovations, and practices of Indigenous and local communities embodying traditional lifestyles relevant for the conservation and sustainable use of biological diversity. Additionally, Parties should promote the wider application of such knowledge, innovations, and practices with the approval and involvement of the holders of such knowledge, innovations, and practices, as well as encourage the equitable sharing of benefits arising from their utilization.
- Indonesia is one of the countries with unparalleled biodiversity, covering 190 million hectares of land and 327 million hectares of marine area. This biodiversity is spread across more than 17,000 islands surrounded by seas. Indonesian Civil Society Organizations (CSOs) are urging negotiators to address three key issues that are crucial to securing the future of biodiversity and the Indigenous and local communities that are part of it.
- As part of their commitment to biodiversity and the rights of Indigenous Peoples and Local Communities, Indonesian Civil Society Organizations have issued a joint statement in response to the ongoing negotiations at COP 16 CBD in Cali, Colombia, from October 21 to November 1, 2023. Here is the link to the joint statement of Indonesian CSOs: [Joint Statement of Indonesian Civil Society Organizations to COP 16 CBD](#)